

## DINAMIKA KONFLIK KEAGAMAAN DI MALUKU SERTA UPAYA RESOLUSI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN

Armita Arvanti<sup>1)</sup>, Bayu Setiawan<sup>2)</sup>, Syamsunaser<sup>3)</sup>, Pujo Widodo<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>email: armita.vianti@yahoo.com

<sup>2</sup>email: bayusetiawan@idu.ac.id

<sup>3</sup>email: syamsunaser@idu.ac.id

<sup>3</sup>email: pujowidodo78@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 20 Juni 2023

Revisi, 23 Juni 2023

Diterima, 17 Agustus 2023

Publish, 15 Januari 2024

#### Kata Kunci :

Konflik

Keagamaan

Resolusi Konflik

Maluku.

### ABSTRAK

Konflik Maluku merupakan konflik lateral antara penganut Kristen dan Islam. Konflik yang terjadi di sebabkan adanya beberapa hal, termasuk ekonomi bahkan politik, dan kemudian berubah menjadi perselisihan rasial dan keagamaan. Banyak kelompok, pemerintah, organisasi non-pemerintah, kelompok adat, serta gerakan masyarakat akar rumput lainnya, atas rasa prihatin sehingga menyatu terhadap konflik yang sedang berlangsung, telah mencoba berbagai solusi. Dalam artikel ini, penelitian kualitatif merupakan bentuk metode yang membantu menggambarkan dan menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik. Konflik Maluku tergambar dengan lumrah sebagai persaingan kuno antara umat Kristiani dan Muslim, tetapi kondisinya lebih kompleks. Konflik dengan unsur kekerasan yang terjadi di Maluku khususnya terjadi di Ambon. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, otoritas keamanan, kelompok masyarakat dan perempuan, organisasi non-pemerintah internasional dan lokal telah dilakukan untuk mengakhiri konflik. Dua pendekatan utama untuk mengelola konflik di Maluku didasarkan pada pendekatan rekonsiliasi dan pembangunan. Pemerintah pusat memulai negosiasi perdamaian antara komunitas Kristiani dan Muslim, yang kemudian berujung tercapainya kesepakatan damai pada Februari 2002 melalui Malino II.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



### Corresponding Author:

Armita Arvanti

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: armita.vianti@yahoo.com

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak hidup dalam masyarakat beragam seperti Indonesia adalah potensi konflik yang tinggi, terutama konflik horizontal. Pluralisme sosial ada di sisi lain, seringkali merupakan bentuk kekayaan itu sendiri. Maluku adalah masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia bagian timur, tempat tinggal bagi banyak suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Keanekaragaman adalah ciri khas Maluku dan telah menyebabkan kehidupan yang damai selama bertahun-tahun. Realitas keragaman tercermin dalam hadirnya 100 suku serta subsuku, 6 resmi dan etnoreligi, dan 117 bahasa atau dialek (Kasuba, 2019).

Realitas keanekaragaman dan ragam perbedaan ini belum tentu menjadi alasan bagi kehidupan yang tidak toleran di kalangan masyarakat. Di suatu sisi, keanekaragaman bisa dijadikan kekuatan untuk menjadi negara yang lebih terbuka. Di lain sisi, perbedaan yang sebenarnya dapat menimbulkan potensi konflik (Nuhriison, 2009).

Konflik Maluku dimulai pada 19 Januari 1999 yang terjadi selang beberapa waktu lamanya. Konflik ini kemudian berdampak pada jatuhnya korban jiwa, penderitaan yang terjadi, kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Konflik

Maluku dianggap sebagai bentuk kerusuhan, tindak kejahatan dan ketidaksesuaian terhadap HAM berat, konflik Maluku meninggalkan kenangan dan goresan luka yang mendalam dalam sejarah dan perjalanan hidup masyarakat di bumi nusantara telah berkembang menjadi negara demokrasi yang diakui dalam konstitusinya dan sesuai dengan HAM yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Waileruny, 2010).

Maluku merupakan wilayah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan Orde Baru sehingga terjadi ketimpangan ekonomi serta sosial. Pasca Orde Baru, Bahardudin Yousuf Habibi, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno menjadikan Putri Marki dan Maluku Utara fokus utama pemerintah Indonesia, termasuk kepentingan elite lokal dan penyembunyian sengketa keagamaan yang kental. Konflik yang berlangsung sejak 1999 itu telah mengguncang banyak faksi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Konflik muncul antar suku, yang kemudian meningkat berubah dan berujung pemasalahan yang terkait agama antara Kristen dan Islam. Pertama-tama ini merupakan sebuah masalah yang sederhana yang mana berujung pada kerusuhan terbatas, akan tetapi sesekali masalah dan konflik melibatkan agama khusus (tertentu) kemudian berujung pada konflik keagamaan Kristen dan Islam. (Waileruny, 2010).

Konflik Maluku 1999-2002 adalah sebuah peristiwa sosial-kemanusiaan yang luas dan menggemparkan dalam hubungan anatar sesama ummat agama di bumi nusantara. Konflik tersebut muncul dari kekerasan massal berupa sinyal dan tanda tanda keagamaan kuat dan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Tragedi naas dan traumatik ini tidak hanya merusak nilai-nilai fundamental sosial-kemanusiaan, namun juga menghancurkan hubungan, strukturs, serta sistem sosial, memakan banyak korban jiwa (Asi, 2011), melumpuhkan ekonomi nasional, dan menghancurkan moralitas sebagai jiwa, norma, dan nilai kemanusiaan. . membentuk limpa homa hidup.

Oleh karena itu, resolusi terhadap konflik tidak dapat dipisahkan dari rekonsiliasi, sebab ialah menjadi bagian dari tahapan penyelesaian konflik, yaitu proses bina damai. Mediasi adalah istilah ilmiah yang menekankan perlunya memandang nilai damai yang merupakan bagian dari alur penyelesaian masalah dan kemudian terbagi dalam fase yang sama dengan dinamika alur konflik yang terjadi. Sengketa dan Masalah sosial patutnya dipandang menjadi tragedi yang muncul dari interaksi yang kompleks dari beragam sebab. selanjutnya, resolusi-konflik paling baik digunakan hanya jika digabungkan dengan mekanisme resolusi konflik terkait lainnya. Mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi dilaksanakan dengan baik melalui upaya komprehensif guna menciptakan kondusifitas dengan damai dan berkelanjutan. Menurut Ralph Dahrendorf, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses

penyelesaian konflik. Pertama, kedua belah pihak harus menyadari situasi dan realitas konflik masing-masing. Kedua, kepentingan pemohon harus diatur sedemikian rupa tiap-tiap stakeholder dapat mengetahui kebutuhan pihak lainnya. Ketiga, kedua belah pihak menyetujui dasar aturan yang menjadi pedoman gotong royong.

Melihat situasi dan kondisi yang ada, pemerintah pusat sebagai badan persiapan swasta mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku untuk mengambil tindakan dan mencapai kesepakatan dengan 35 kota untuk menyelesaikan masalah tersebut. anggota dewan Ada 35 delegasi dari pihak Muslim dan 35 orang dari pihak Kristen. Selain itu, pemerintah dan mediator perdamaian mengirimkan masing-masing 10 orang perwakilan untuk perjanjian perdamaian di Malino, Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 dan 12 Februari 2002 (Tidore, 2020). Penandatanganan Kesepakatan Malino II pada tahun 2002 memungkinkan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Selatan kembali normal dan pulih. Namun setelah diteliti dengan seksama, bukan berarti penduduk Maluku dapat hidup damai dan kondisi normal kembali. Ketakutan dan ketidakpercayaan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Agama mundur karena takut akan konflik acak dan terjun ke konflik tersebut, membangkitkan kenangan kelam (Rahawarin, 2010).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu yang memungkinkan memeriksa objek berdasarkan deskripsi eksplisit untuk menemukan berbagai aspek dari peristiwa yang dianggap penting untuk masalah tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan dinamika konflik Ambon dan menganalisis pemicu konflik. Itu kemudian direformasi untuk menjadikan perubahan dan rekonsiliasi sebagai alat resolusi konflik untuk membangun perdamaian di seluruh konflik yang muncul. . Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan kerangka untuk menggambarkan topik penelitian dalam hal nilai-nilai yang terlibat dalam penyelesaian konflik, menemukan informasi yang tepat dan mengungkap informasi di balik peristiwa maupun tragedi penting. Penting atau tidaknya informasi yang dihasilkan melalui artikel tergantung pada relevansi dan relevansinya dengan subjek penelitian dan pertanyaan yang dipelajari untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.

Informasi dalam menyusun data dan informasi didapatkan dari beragam sumber yang ada seperti buku, surat kabar, karya sastra dan internet. Teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik dokumentasi dan mencari informasi tentang masalah dan variabel secara tertulis, seperti: Catatan Harian, Biografi, Kebijakan dan Praktek. Atau dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, dll. Ini bisa dalam bentuk

karya seperti gambar atau film, tetapi perhatikan bahwasanya keseluruhan sumber tersebut digunakan sebenarnya terkait bersama subjek pembahasan (Samsu, 2017).

Menganalisis data menggunakan teknologi analisis konten. Analisis data adalah usaha atau langkah untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi, cerita, atau tabel. Ini menarik kesimpulan dan deskripsi nantinya dapat diambil dari analisis data dan menarik kesimpulan untuk penelitian. Analisis konten merupakan metode penelitian yang dapat membantu menarik kesimpulan dimana bisa diulang tentang keakuratan data dalam konteks tertentu. (Samsu, 2017).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik berarti konflik, pertikaian, perjuangan (Depdiknas, 2008). Makna ini menunjukkan bahwa konflik adalah suatu kondisi atau situasi di mana suatu peristiwa terjadi. Konflik mempunyai definisi yang berbeda sehubungan dengan perspektif dari masing-masing orang. Konflik juga dipahami dengan artian sebagai fenomena positif dan negatif. Dalam arti positif, konflik dipahami berupa situasi dimana terjadi konflik atau diskusi antar beberapa pihak maupun kelompok guna mewujudkan harapan dan cita-cita tinggi serta tidak adanya ketidaknyamanan diantaranya. Konflik/sengketa tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya produktivitas bagi perseorangan, kelompok dan organisasi. Sebaliknya, dalam arti negative dipahami bahwa konflik ialah suatu perjuangan yang dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok guna mendapatkan kemenangan ataupun kehancuran. Dengan arti lain, bahwa dalam proses terjadinya konflik negatif, individu akan berusaha untuk menjatuhkan dan mengupayakan hal-hal yang kiranya harus di jauhkan sebab akan mempengaruhi jalannya suatu sistem atau kehidupan (Puspita, 2018).

Konflik muncul karena masyarakat tidak terbiasa menghadapi perbedaan secara objektif. Karena setiap orang memiliki kualitas dan karakteristik yang berbeda, mereka semua memiliki kebiasaan dan sikap yang berbeda. Apalagi sumber konflik selalu sikap egois yang merasa lebih benar. Konflik muncul dari perbedaan interaksi masing-masing individu. Perbedaan tersebut biasanya berkaitan dengan ciri fisik, pengetahuan, kecerdasan, kepercayaan, kebiasaan, dll. Oleh karena itu, konflik didalam interaksi-sosial ialah suatu bentuk kewajaran yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. (Rahmat, 2019).

Menurut Johann Galtung, penyebab konflik tersebut adalah adanya titik berbeda dalam kebutuhan dan nilai kepentingan antar beberapa person. Di sisi lain, Menurut C.R.Mitchell, penyebab konflik adalah terbatasnya sumber daya serta kepentingan dan tujuan dalam titik yang berbeda. Kemudian, konflik juga bersumber dan muncul melalui SARA (suku, agama, ras dan golongan), persaingan antar bangsa,

ketidakadilan terhadap kebutuhan dasar dan kesalahan komunikasi (Indrawan, 2019). Berdasarkan sumber Darrendorf, konflik dapat terjadi dalam masyarakat mana pun. Hal ini karena seluruh masyarakat mempunyai kebutuhan yang patutnya diperhatikan, serta guna memenuhi kebutuhan itu kadangkala berarti mengesampingkan kebutuhan umum masyarakat. Merasa tertindas oleh tindakan orang lain merupakan bukti suatu gejala konflik yang terdapat pada individu maupun kelompok/organisasi. Kemungkinan terjadinya konflik sosial kadangkala sesuai dengan bentuk konflik antar individu. Konflik dapat meningkat menjadi konflik interpersonal yang mungkin terbatas pada kedua belah pihak tetapi dapat meluas ke anggota keluarga, kerabat, komunitas, dan komunitas etnis kedua belah pihak (Suparlan, 2014).

Perdebatan tentang konflik agama antar umat kristiani dan muslim di Maluku sebenarnya bukan hal baru, terjadi antara tahun 1999 dan 2002. Padahal, konflik agama ialah pola berkelanjutan atas perlakuan tidak adil serta pengucilan sosial yang disebabkan kebijakan masa kolonial dan republik (Marieta, 2004). Semasa kerajaan Muslim Ternate dan Tidore pada abad ke-17 dan ke-18, hubungan antar pulau terjalin di sepanjang jalur komersial dan misionaris. Hubungan dengan Pella juga diperkuat secara teratur untuk meningkatkan kohesi masyarakat dan mengurangi persaingan komersial antar pulau. Situasi harmonis itu berubah dengan datangnya kekuatan imperialis di Maluku. Pada pertengahan abad ke-18, Portugal dan Spanyol membentuk aliansi untuk membagi pulau Ternate dan Tidore menjadi federasi saingan. Puncaknya dicapai pada abad ke-19 ketika Belanda mulai menginvasi wilayah Maluku untuk menguasai kalori dan sumber rempah-rempah lainnya.

Maluku kemudian menaklukkan pulau Ternate dan Tidore dan menjadi sepenuhnya Belanda dari pertengahan abad ke-19. Dari tahun 1999 hingga 2002 konflik agama yang dalam dan meningkat bermula saat Belanda mengorganisir misi Kristiani kepada penduduk setempat. Karya misionaris Kristen Utrecht Zending's Fereniging (UNZ) memang menjadi unsur yang tergabung dalam giat Belanda guna melemahkan intervensi Ternate yangmana semakin berkembang di Maluku (Hadi, 2007). Ini membuat Marc terisolasi secara politik, sosial dan agama. Maluku Utara sendiri bernama Reichtu Jazira di bawah pengaruh kerajaan Muslim Ternate dan Maluku Selatan di bawah pengaruh Kristen Belanda Reichtu Jazira. Seorang misionaris bernama Reitimur. di semenanjung.

Selain rasisme yang dapat menimbulkan konflik, banyak orang Kristen Maluku yang dianggap bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan menjadi birokrat (ambutenaar) dan tentara Belanda pada masa penjajahan. Berbeda dengan umat Muslim yangmana kurang berkenna berkolaborasi bersama Belanda sebab tidak loyal kepada mereka, umat Kristen Maluku sendiri disekolahkan sebagai orang terpelajar. Akibatnya, Muslim Maluku mengalami

marginalisasi dan diskriminasi sosial dan ekonomi selama kolonialisme (Pieris, 2004).

Belakangan, pada era Republik, kondisi keistimewaan umat Kristen Maluku berubah. Pemerintah pusat melabeli umat Kristen sebagai separatis karena banyak di antara mereka yang menjadi anggota RMS. Hal ini menguntungkan umat Islam Maluku yang terdiskriminasi dan terpinggirkan pada masa penjajahan, dan mampu mengendalikan birokrasi pemerintahan yang sebelumnya didominasi Kristen. Dalam sistem politik Maluku di Belanda, pekerjaan birokrat negara memang merupakan profesi yang bergengsi. Akibatnya, banyak pemuda Maluku yang lebih banyak terlibat dalam dunia birokrasi daripada di sektor bisnis yang menjadi sumber kegiatan ekonomi mereka (Klinken, 2007).

Terlepas dari "Islamisasi" birokrasi. Umat Kristiani juga mendapat serangan dari pendatang-pendatang seperti pedagang Bugis, Buton serta Makassar yangmana mendominasi dunia dagang dalam skala kepulauan di Maluku. Di tengah penindasan sosial-ekonomi dan sosial-keagamaan, "Islamisasi" ini akhirnya menyelesaikan konflik Maluku pada tahun 1999, ketika keluhan orang-orang Kristen Maluku era Orde Baru berusaha menular ke umat Islam. Konflik yang sebenarnya adalah persaingan antar birokrat, yang kemudian berkembang menjadi konflik agama. Sumber konflik tambahan muncul dari persoalan birokrasi seperti konflik utama (core conflict), seperti:

Dimensi Sumber Konflik	Komunitas Islam Maluku	Komunitas Kristen Maluku
Birokrasi Pemerintahan maupun Ekonomi	Islam merasa "disisihkan" dalam pola rekrutmen birokrasi.	Kristen mendapat tekanan adanya "islamisasi" birokrat dan kalah bersaing dengan kelompok BBM.
Politik	Kecurigaan terhadap kaum Kristen Maluku dalam kelompok RMS.	Isu "negara Islam" maupun jihad yang meresahkan kaum Kristen.
Keagamaan	Oikumene, dominasi simbol-simbol agama Kristen di tempat publik yang bisa mengganggu akidah.	Munculnya gerakan fundamentalisme Islam, aksi perusakan gereja.
Pendidikan	Merasa dianaktirikan.	Khawatir adanya "Islamisasi".

Sumber : Novri Susan (2010)

Semua faktor ini berkontribusi pada konflik/sengketa anarkis agamisme di Maluku, yangmana secara praktis bisa disederhanakan menjadi 2 subjek.

(1) persaingan antar elit dalam perebutan penguasaan sumber daya alam, posisi birokrasi dan politik, dan (2) etnosentrisme dan peningkatan religiusitas sebagai sarana untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan politik. Mengesampingkan dua asumsi yang menjadi inti konflik, bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa persaingan antara Islam dan Kristen juga merupakan konflik dukungan. Agama bahkan bisa berperan penting dalam menciptakan konflik yang sebenarnya hanya persaingan ekonomi dan politik.

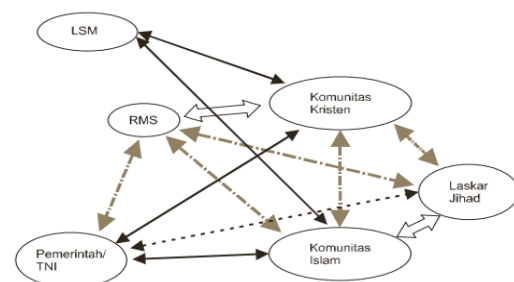
Jika diamati lebih dekat, harus dipahami bahwa hubungan keagamaan muncul di Maluku dan bahwa

kelompok-kelompok yang didasarkan pada afiliasi atau afinitas keagamaan muncul dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politisasi identitas agama Islam dan Kristen berada di luar konflik itu sendiri dan terkait dengan konflik status birokrasi. Eksklusivitas Islam dan Kristen yang kemudian melahirkan konflik anarkisme agama itu bisa di analisis diantaranya:

Pertama, konteks/indeks agama diimplementasikan secara simbolis dan formal, mempengaruhi krisis agama dan menciptakan sikap yang diwariskan terhadap agama. Karena sikap egosentris inilah, baik umat Islam maupun umat Kristiani berlomba-lomba mengembangkan dan menyebarkan simbol-simbol agama ketimbang agama yang membebaskan dan menerangi kehidupan manusia. Dan ini mengarah pada perdebatan teologis dan tindakan pribadi yang membenarkan agama mereka sebagai "benar". Kedua, agama cenderung elitis dan tidak populer. Agama membantu para penguasa ( mustad'afin ), bukan yang terpinggirkan. Agama telah kehilangan semangat pembebasan yang membebaskan manusia dari ketidaksetaraan dan diskriminasi.

Keterkaitan antara agama dan kekuasaan itu sendiri dihasilkan dari birokratisasi sebagian besar formalitas agama, termasuk pendeta dan pendeta. Birokrasi yang memanfaatkan adanya persoalan agama, sebenarnya berfungsi untuk menjamin kesetaraan dalam penyelenggaraan kerja. Namun, konflik muncul di antara kedua kelompok tersebut. Ketiga, agama mengontrol dan melindungi kekuasaannya. Ini melampaui kesenjangan yang tumbuh antara agama dan rakyat mereka. Karena tidak ada pemuka agama yang bisa mengharmoniskan tindakan umat sebagai nabi sosial, umat tersesat dan timbul konflik.

Keempat, politisasi agama untuk keuntungan individu atau kolektif. Agama dalam konteks ini bukan lagi sebagai kekuatan pemersatu, melainkan kekuatan pemecah belah, bahkan pemecah belah. Kerukunan atau perdamaian umat beragama sebenarnya merupakan ungkapan tabu ketika adanya sekelompok mengatasnamakan bahwa agama/kepercayaan adalah untuk kepentingan kelompok tersebut. Kelima, adanya rasa fanatic terhadap agama. Inilah benih chauvinisme agama, yang kemudian berbatasan dengan tumbuhnya saling permusuhan antar umat beragama.



Gambar. Pola Relasi Konflik di Maluku

Sumber : Budi Sutyono, (2013).

**Tabel Dinamika Konflik di Maluku**

Tahun	Bulan	Peristiwa Konflik
1999	Januari	Perkelahian Jalanan yang berkembang menjadi kerusuhan Ambon.
	Maret	Kekerasan massal mulai menyebar di Maluku
	Mei	Kekerasan mereda karena event kampanye Pemilu.
	Juni	Pemilu
	Juli	Kekerasan massal di Ambon
	Desember	Pembakaran Gereja Silo dan Pembantaian desa Muslim Tobelo
	2000	Mei
	Juni	Pembantaian di Galela, Maluku Utara
	Desember	FKM mendeklarasikan Republik Maluku Selatan.
2001	Januari	Operasi gabungan yang dilakukan oleh Batalyon Gabungan dengan target "Muslim garis keras".
2002	Februari	Perjanjian Damai Malino ditandatangani
	April	Kantor pemerintahan Maluku dibakar
	Mei	Jafar Thalib maupun Alex Manuputty ditangkap
	Oktober	Situasi kondusif berangsur-angsur membaik

### Dinamika konflik

Pertama, situasi sebelum konflik. Pada tahap ini, konflik muncul sebagai tujuan dari konflik antar 2 pihak bahkan lebih. Dilihat dari konflik Maluku, konflik Ambon bermula dari peristiwa 19 Januari 1999 saat hari raya umat Islam. Tragedi selisih antar pemuda kristiani dan pemuda Islam di kawasan Mardika Ambon. Baturmera, sebuah desa dekat Mardika. Perkelahian mulanya sekedar interkasi pendatang islam dengan warga Ambon Kristen, dimana kemudian mereka (kedua belah) pihak saling serang satu sama lain.

Kedua, Konfrontasi. Sebuah fase yang menunjukkan situasi terbukanya sebuah konflik. Apabila kepercayaan terhadap masalah hanya sepihak, maka pihak yang mendukung akan mengorganisir demonstrasi dan konflik lain-nya. Pada Agustus 1999, konflik Maluku pecah antar 2 suku di Halmahera tengah. Suku ini merupakan keturunan masyarakat adat Khao yang beragama Kristen Muslim dan Muslim Macian. Ketika selang waktu di Oktober 1999, Macian mendapati serangan lagi sehingga mereka berpindah ke pulau terdekat Ternate. Tersanjung oleh belas kasihan Muslim atas derita yang dirasakan orang Macian, adapun mereka melakukan penyerangan terhadap umat Kristen di Ternate serta selanjutnya mereka pun berpindah tempat di wilayah umat Kristen lainnya. Sehingga, pada akhirnya pertikaian antar etnis lokal berlanjut jadi pertikaian lokal keagamaan.

Ketiga, fase (Krisis) pada bagian ini adalah klimaks pertikaian saat menegangnya situasi dan pertikaian mendapati titik tertinggi. Biasanya ini

merupakan masa perang/konflik dan orang-orang terbunuh di masing-masing sisi. Konflik Maluku selalunya di umpamakan dalam bentuk persaingan lama diantara kristiani dan muslimin, tetapi situasinya bisa jadi makin runyam. Pertikaian dan konflik tragis di Maluku, khususnya di Ambon, berkembang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejak jatuhnya Suharto. Antara tahun 1999 dan 2002, pertikaian memakan korban jiwa sekitar 5.000 jiwa serta mengakibatkan penduduk Maluku maupun Malut mengungsi sekitar sepertiga dari total penduduknya.

Keempat, Skor. Fase inilah adalah hasil dari fase (krisis). Bagian dari sisi pihak mengalahkan lainnya apabila (jika perang pecah) menandatangani gencatan senjata. Pihak lainnya bisa saja mungkin tidak mengalah terhadap permintaan pihak lainnya. Dalam konflik Maluku, seorang prajurit Kao bernama Benny Bitjara melancarkan serangan balik pada pagi hari tanggal 24 Oktober setelah Makian mengancam akan merebut wilayah Makian. Semua rumah Macian pada wilayah tersebut habis dilalap api. Semua warga Machis, 17.000 orang, berpindah di pulau Ternate dan Tidore melalui Selat Barat. Ketika selang waktu 27 Desember, skuadron Kristen yang kembali, dipimpin oleh Benny Villala, dengan dukungan dari berbagai aliansi Kao, dapat menanggapi berita bahwa gereja Silo di Ambon dibakar keesokan harinya. Sehingga datanglah mereka lagi untuk memerintah kota. Aksi tersebut dilakukan dalam iman yang tak tergoayahkan. Aksi yang mereka perbuat menghilangkan nyawa manusia yang jumlahnya tidak sedikit, baik itu Wanita, pria, bahkan anak-anak muslimin. Perusakan tempat tinggal, rumah berdoa perkantoran dan wilayah lainnya dapat dikategorikan pada level menakutkan, khususnya pada wilayah Galela, sebelah baratnya Tobelo.

Kelima, situasi pascakonflik. Fase inilah adalah tentang menyelesaikan keadaan melalui penyelesaian berlangsungnya pertikaian, menghilangkan tegangnya situasi serta membawa relasi kondusif para pihak-pihak menuju keadaan lebih baik dan damai. Pada dinamika konflik di Maluku, pertikaian diakhiri dengan beragam cara guna mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat Halmahera Utara. Upaya tersebut sebagai bentuk mempertahankan kontak serta menjalin hubungan dimulai pada Agustus 2000 dan setuju dalam menghentikan pertikaian sejak bulan Juni di tahun selanjutnya.

### Upaya Resolusi Konflik

Berbagai bentuk resolusi konflik digunakan untuk mencari solusi terbaik. Setiap kali perselisihan diselesaikan, kepentingan baru muncul dan mungkin bertabrakan, dan sistem sosial terus-menerus mengalami konflik. Ada dua jenis penyelesaian sengketa:

Penyelesaian sengketa persuasif dan penyelesaian paksa. Penyelesaian sengketa afirmatif melalui pendekatan persuasif serta penilaian demi

mendapatkan titik terang dalam sisi kelompok yang berselisih. Para kelompok bersengketa dapat bernegosiasi diantara sesama mereka ataupun melalui mediator sebagai pihak yang menjembatani. Jenis resolusi atas sengketa negosiasi ini menghasilkan resolusi sengketa secara penuh atau diselesaikan. Adanya kesamaan diantara dua kelompok/pihak berseberangan disebabkan opini publik terbentuk dengan spontan. Penyelesaian perselisihan paksa terjadi ketika pihak/kelompok lebih dominan memakai kekuatan fisik ataupun mengancam dengan tujuan intimidasi yang lain, sehingga memungkinkan pihak/kelompok pelaku konflik untuk berubah pikiran dan setuju dengan pendapat pihak yang lebih kuat. Tindakan pemaksaan menurunkan kualitas penyelesaian sengketa karena pada kenyataannya sengketa tidak sepenuhnya terselesaikan (Lindawaty, 2011).

Selama konflik Ambon 1999-2002, proses perdamaian yang akhirnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat sangat singkat dibandingkan dengan penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002, karena luasnya konflik. Sulawesi Selatan, Pegunungan Malino. Dua pejabat pemerintah terlibat dalam pelaksanaannya: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Youssouf Kalla. Saat itu, Yusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih perwakilan dari komunitas Muslim dan Kristen.

Kedua delegasi kemudian memilih kelompok besar yang terdiri dari 35 Muslim dan 34 Kristen dari komunitas mereka sendiri, 69 di antaranya berkumpul di Malino selama tiga hari. Prosedur cepat ini tentu saja tidak memungkinkan partisipasi perwakilan komunitas Muslim dan Kristen. Bahkan, pemuka agama pun tidak hadir dalam sidang tersebut. Karena itu, sebagian warga merasa wakilnya tidak mewakili pandangannya. 33 Meskipun pemerintah pusat dan daerah peduli tentang persamaan perwakilan, mereka tidak cukup memperhatikan siapa yang diwakili tiap-tiap dari mereka serta mengetahui jika mereka mempunyai kemampuan serta kekuatan guna melaksanakan kesepakatan. Akan tetapi, karena Malino II ialah perjanjian damai dan bukan deklarasi seperti Malino I, Malino II adalah kenyataan bahwa politik dalam konflik ini dianggap selesai dengan formal serta ada kemauan politik dominan saat itu demi menghapuskan aksi kekerasan. Konvensi Malino II terdiri dari 11 pasal:

1. Hentikan semua konflik dan pertengkaran.
2. Mematuhi aturan hukum secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, pejabat harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatisme, termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap orang berhak untuk tinggal dan berusaha di wilayah Maluku dengan menghormati budaya setempat.

5. Segala bentuk organisasi, entitas kelompok atau kelompok milisi bersenjata tanpa izin dilarang di Maluku dan harus menyerahkan atau melucuti senjata serta mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Orang luar yang mengganggu Maluku harus keluar dari Maluku.
6. Untuk melaksanakan semua ketentuan hukum, perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, RMS Kristen, Pejuang Jihad, Prajurit Kristus dan pindah agama secara paksa.
7. Pengungsi secara bertahap kembali ke lokasi pra-konflik mereka.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi ekonomi dan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, perumahan keagamaan dan sosial, agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat kembali berkembang dan terbebas dari kesulitan. Oleh karena itu, segala pembatasan ruang gerak penghuni akan dibuka agar kehidupan ekonomi dan sosial dapat berjalan lancar.
9. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di segala bidang dan masyarakat, diharapkan TNI/Polri memiliki persatuan dan kekuatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Alhasil, seluruh fasilitas TNI segera dibangun kembali dan beroperasi kembali.
10. Untuk menjaga hubungan dan keharmonisan seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen, segala usaha dan upaya dakwah harus tetap mengikuti undang-undang dan peraturan lainnya tanpa paksaan.
11. Mendukung rehabilitasi, khususnya di Universitas Pattimura, sesuai dengan prinsip kemajuan bersama. Oleh karena itu, ketenagakerjaan dan kebijakan lainnya dilakukan secara terbuka berdasarkan asas keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Menurut Yusuf Kalla, untuk menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu harus mengetahui kepribadian dua pihak/sisi serta mengumpulkan data/informasi yang banyak. Tak satupun pihak/kelompok yang ingin dalam kedamaian akan tetapi mendapati mereka harus terluka. Tetapi jika mereka tidak melakukannya dan menawarkan untuk mengakhiri konflik, mereka akan melakukannya. Itu sebabnya masyarakat mempercayai masyarakat dan tokoh agama dan mereka memainkan peran yang sangat penting. Media pun memainkan peranan yang penting ketika terjadi suatu konflik/pertikaian. Media massa bisa dipandang menjadi instrumen pendamai, akan tetap juga bisa sebagai faktor penting munculnya pertikaian/kekerasan. Media seperti surat kabar, radio dan internet juga turut andil dalam kekerasan dalam konflik Ambon. Media juga terbagi berdasarkan keyakinan/agama serta dipakai guna membagikan informasi yang salah. Contohnya pemanfaatan media untuk membangun perdamaian di masa konflik antara lain dengan mengadakan Lokakarya Gerakan Damai

Bakbe di Ambon guna menumbuhkan kesadaran akan bergunanya dan harusnya konflik dihentikan, serta pelatihan atas jurnalistik. Pendidikan dalam jurnalisme damai yang mengarah ke Marc Media Center. (MMC) (Lindawati, 2011).

Dalam konteks kebangsaan, penyelenggaraan negara juga harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas pandangan hidup masyarakat yang beragam dan bertindak bijaksana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan serta terus berlanjut. Pada level daerah, keadilan dan pemerataan sumber daya akan ekonomi dan politik sepatutnya adil serta merata. Ini diakibatkan beragamnya struktur soal masyarakat Ambon, Maluku. Agar dapat memfasilitasi terwujudnya kedamaian, aparatur pada instansi terkait seperti pemerintah daerah harusnya mampu membangun sistem resolusi dalam mengatasi ragam masalah negative yangmana akan meruka sistem/proses rekonsiliasi yangmana berlangsung. Prioritas sosialisasi harus dikomunikasikan pada semua lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Hal ini membantu menuntun percakapan bersama warga lokal dan mengakibatkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun nilai damai di Ambon (Lindawaty, 2011).

Adapun juga, disarankan untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keadaan dan budaya setempat. Konflik juga dapat diselesaikan atas prakarsa orang-orang yang masih menghormati adat setempat dan mengakui pentingnya budaya lokal untuk menjamin dan memelihara persatuan sosial. Model resolusi konflik melalui pandangan warga lokal adalah dengan melalui metode kearifan masyarakat Ambon dan sistem atau praktik kekerabatan yang disebut *Pela Gandong*. Kata "pela" berasal dari kata "pila" yang berarti "melakukan sesuatu bersama-sama". Kata "pila" terkadang memiliki akhiran "tu". Artinya memperbaiki sesuatu, membuatnya lebih kuat dan mencegahnya agar tidak mudah pecah atau rusak. Di sisi lain, "Gadong" diterjemahkan sebagai "dari rahim yang sama" dan mungkin memiliki nenek moyang yang sama. *Pela Gandong* adalah perjanjian antara 2 desa di Ambon yang berbeda agama sesuai atas garis keturunan (Bakri, 2015).

sesuai sudut pandang kekeluargaan Ambon, ini merupakan faktor/sebab kunci dalam menciptakan integritas sosial. Perbedaan-perbedaan kepercayaan/agama biasanya diatasi di Ambon melalui kekeluargaan kuat berdasarkan sistem patrilineal. Mungkin ada orang di keluarga Anda yang menganut agama lain, tetapi Anda tetap bisa menjalankan agama dan beribadah dengan tenang. Dengan kata lain, *Pela Gandong* telah mempunyai nilai rekonsiliasi. Nilai-nilai budaya yangmana melekat dalam kehidupan di Ambon kiranya bisa sebagai nilai fundamental untuk memperkokoh kohesi dan integritas serta dalam rekonstruksi wilayah pasca-konflik. Adat dan budaya kekeluargaan harus dilestarikan agar tercipta sinergi yang baik dalam

karya pembangunan Ambon ke depan. Jika proses integrasi menurut model Perak-Gandon berhasil, inisiatif bersama dari berbagai agama dan provinsi kota Ambon bersama-sama akan memperbaiki kondisi sosial. Kearifan lokal Perak Gandon berpengaruh positif terhadap penyelesaian sengketa SARA di Kota Ambon (Bakri, 2015).

Untuk menyelesaikan konflik Maluku, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sudah berbuat dengan maksimal dengan ragam cara guna meresolusi konflik dan membangun nilai damai. Namun, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tergolong belum efektif. Oleh karena itu, pendekatan adat adalah menjalin hubungan kekerabatan antar penduduk Maluku. Ini harus mengakhiri konflik karena ikatan persahabatan antara komunitas tetap kuat. Selain itu, penting untuk memasukkan peran berbagai lapisan masyarakat sebagai Upaya meresolusi konflik yangmana muncul. Sadarnya masyarakat Maluku dalam mengakhiri pertikaian menjadi titik terpenting guna penyelesaian konflik. Adapun juga, tercapainya perdamaian di Malka membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Bekerja sama untuk menyelesaikan konflik membutuhkan komitmen serius dari berbagai tingkat pemerintahan, aparat keamanan, LSM dan masyarakat. Diantaranya seperti ras, suku maupun agama ialah bagian dari elemen yangmana dominan dalam sensitivitas hidup antar pihak di manapun. Berdasarkan dinamika konflik/masalah Maluku tahun 1999, warga Maluku pun mempunyai harapan agar kiranya konflik serupa tak terjadi lagi saat kemudian hari. Cukup dikatakan bahwa konflik Maluku terjadi sekali pada tahun 1999 dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi, misalnya, dalam konflik tahap B, mediasi diperlukan untuk menilai pentingnya konflik sehingga tak meningkat sebagai masalah yangmana lebih besar/rumit yang mengakibatkan banyak korban dan meminimalkan terjadinya konflik serupa.

Poin penting lain yang kiranya harus di gunakan pada proses resolusi konflik di Ambon dan daerah lain di Indonesia pada masa konflik adalah bahwa cara penyelesaian sengketa harus mengacu pada empat pilar kewarganegaraan Indonesia. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika seperti ahli waris. Pendiri suatu bangsa. Upaya ini harus memungkinkan Kapolda Ambon untuk memulihkan Kamtibmas Ambon. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dimaknai sebagai tekad untuk menghargai perbedaan dan bukan menciptakan persatuan. Pada saat yang sama, Pancasila tidak luput dari perubahan gaya hidup dan keanehan budaya Indonesia. Semoga nilai/norma luhur dan pluralisme dalam kandungan Pancasila bisa mempersatukan seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, agama maupun politik. Oleh karena itu, mengembalikan landasan Pancasila dan ideologi bangsa adalah solusi dari konflik sosial umum.

#### 4. KESIMPULAN

Masalah/Konflik kadangkala tak terlepas bahkan dipahami sebagai hal yang melekat dalam hidup sosial/politik. Ketika masalah/konflik muncul, itu harus ditangani, ditangani dan diubah, daripada melarikan diri darinya atau membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Konflik/pertikaian tahun 1999-2002 menjadi masa dengan peristiwa tragis dan pilu. kahidupan ber-sosial yang dibangun di atas rasa-persaudaraan, perdamaian, kerukunan dan dengan harmonisasi telah dihancurkan oleh pemahaman yang menyimpang dari masalah konflik saat ini. Agama juga terlibat dalam konspirasi para pencari platform di Maluku. Konflik ini berhasil menembus keterisolasian masyarakat, rasa saling curiga, ribuan kematian, kelumpuhan ekonomi, dan mentalitas saling bunuh, dan melahirkan sebuah cerita yang masih melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Maluku hingga saat ini. Muncul dari rahim budaya penduduk Maluku dengan berbagai nilai sosialnya, Pella Gundon merupakan nilai awal untuk dipahami dan dijadikan alat rekonsiliasi.

Konflik/tragedi Maluku kerap di deskripsikan menjadi konfrontasi kuno dianata umat kristiani dan muslim, tetapi kondisinya yang jauh runyam. Konflik/masalah pertikaian di Maluku, khususnya di Ambon, diphamai sebagai bagian masalah yang destruktif yangmana meletus pasca tumbangannya pemerintahan Suharto. Antara tahun 1999 dan 2002, konflik tersebut menewaskan sekitar 5.000 orang dan menelantarkan sepertiga masyarakat di Malut dan Maluku. Konflik/tragedi Ambon dipicu oleh peristiwa pada 19 Januari 1999 saat hari raya Idul Fitri. Pertikaian yang mulanya diawali hanya diantara pemuda kristiani dari Mardika yang merupakan sebuah wilayah di Ambon dengan pemuda muslim dari wilayah Batumerah, yang mana desa dekat batas Mardika. Hal inilah yang kemudian berujung isu-isu yang makin runyam dan krisis sehingga memicu kekerasan di desa-desa terdekat.

Perkelahian pada mulanya hanya terjadi antara warga Ambon yang beragama Kristen dengan pendatang/pedagang Muslim di Sulawesi Selatan (Bugis, Buton dan Makassar), yang salingserang. Konflik tersebut diselesaikan dengan Perjanjian Damai Halmahera pada Agustus 2000 dan Halmahera mulai berkomunikasi satu sama lain. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, antara lain pemerintah daerah serta pusat, masyarakat, kelompok perempuan, aparat keamanan dan juga LSM lokal & internasional. kedua metode utama penyelesaian konflik/masalah di Maluku didasarkan pada: pendekatan pemulihan serta pembangunan. Melalui Malino II, pemerintah pusat memulainya dengan negosiasi persuasif diantara umat kristiani dan muslim sehingga mendapatkan kesepakatan pada Februari 2002.

Adapun juga, tokoh agama dan yang di tuakan dalam masyarakat mempunyai peran dominan saat konflik terjadi sebab warga lokal dengan logis

mempercayai mereka. Di sisi lain, media massa juga berperan dominan/penting saat berlangsungnya pertikaian. Media massa bisa di pakai dalam Upaya mewujudkan instrumen kedamaian, namun juga bisa juga berubah sebagai faktor penting munculnya kekerasan/krisis. Contohnya penggunaan media untuk membangun perdamaian di masa konflik antara lain menyelenggarakan lokakarya Gerakan Perdamaian Bakubae dan pelatihan jurnalisme untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengakhiri konflik Ambon. Pendidikan dalam jurnalisme damai yang mengarah ke Marc Media Center (MMC).

#### 5. REFERENSI

- Asi, A, Rohaizia. dkk. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis di Maluku, Papua dan Poso*. Switzerland: Center For Humanitairan Dialogue, p. 15.
- Aziz, SR, Abdul. 2019. *Transformasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah*. Ilmu Politik FISIP. Universitas Brawijaya.
- Bakri, Hendry. 2015. *Resolusi Konflik melalui pendekatan Kearfian Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin
- Buchanan, C. ed.,(2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, Jakarta.
- Hadi,Saymsul. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta. Yayasan Obor. h. 165.
- Hasan, Hidayat & Sulasman. 2022. *Rekonsiliasi Konflik Ambon Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pela Gandong, 1999-2002*. Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Indrawan, J. (2019). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing
- Jati, R. Wasisto. (2013). *Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Wallsongo.
- Kasuba, G Abdul. (2019). *Resolusi Konflik dan Membangun Perdamaian di Provinsi Maluku*. Dalam Rachma Fitriani. dkk. *merawat Perdamaian 20 Tahun Konflik Maluku*., Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, p. 6.
- Krisnadi Ernita, dkk. 2013. *Resolusi Konflik Komunal di Maluku PASca Reformasi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Dipenogoro.
- Lindawaty, D. S. (2011). *Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya*. *Politica*, 2(2), 271–297.
- Marieta, J.R. (2014). *Konflik Maluku Utara: Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang*. Jakarta. LIPI. h. 114.
- Nuhrison, H dkk. (2009). *Studi Sosiologi /Antropologi Hubungan Antar Kelompok Pasca Kobflik Di*



- Berbagai Daerah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, p. 3.
- Pieris, Jhon. (2004). Tragedi Maluku: Krisis Sebuah Peradaban. Jakarta. Yayasan Obor. h. 269.
- Puspita, W. (2018). Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan. Deepublish.
- Rahawarin, Y. (2013). Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual, Kalam, Vol. 7, No. 1, p. 96-97.
- Rahmat, M. (2019). Ensiklopedia Konflik Sosial. Tangerang: Loka Aksara.
- Samsu, S. (2017). Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). ISBN 978-979-24-0469-2
- Setyono, Budi. (2013). "Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 6.
- Suparlan, P. (2014). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. Antropologi Indonesia.
- Susan, Novri. (2010). Negara Gagal Mengelola Konflik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar), h. 164.
- Tidore, B. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Teologi Bakubae: Studi Konflik Ambon 1999-2002. Tangerang: YPM, p. 259
- Waileruny, S. (2010). Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku. Yayasan Pustaka Obor Indonesia